

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

6.1. Simpulan

Pertama, pengalaman guru Sejarah sebagai Guru Penggerak memberikan makna yang khas terhadap perempuan. Adapun makna perempuan yang diyakini oleh Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang, yaitu: 1) Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah memaknai perempuan sebagai perempuan ideal yang mampu menjalankan peran tradisional sebagaimana peran profesional; 2) Peran tradisional sebagai perjuangan feminisme. Peran tradisional bukanlah hambatan atau hal yang harus ditolak dalam perjuangan feminisme. Peran tradisional sebagai perjuangan feminisme memberikan pemahaman baru mengenai feminisme. Melalui pengalaman tersebut, perempuan sedang menuliskan sejarahnya sendiri (*writing woman*), bukan sekadar menjadi objek yang dituliskan (*written woman*); 3) Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang secara menjadi agen perubahan dalam menghadirkan pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah. Guru Penggerak mengakui bahwa mengaitkan materi sejarah dengan feminisme tidak mudah (*tricky*), namun tetap berupaya mengangkat isu-isu gender secara kontekstual dalam materi pembelajaran Sejarah. Melalui pendekatan ini, Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah tidak hanya mengenalkan sejarah perempuan, tetapi juga membentuk cara berpikir, sikap, dan nilai siswa untuk lebih kritis terhadap bias gender. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai feminisme tidak diterima sebagai doktrin sakral, melainkan sebagai narasi yang terbuka untuk digugat, dinegosiasikan, dan disesuaikan dengan konteks lokal.

Kedua, Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang menerapkan pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah sebagai upaya sadar dan reflektif dalam menggugat bias gender dalam pendidikan. Meskipun Kurikulum Merdeka belum secara eksplisit mengakomodasi perspektif feminis, Guru Penggerak berupaya memanfaatkan ruang-ruang kritis di dalam kelas untuk menghadirkan pedagogi feminis yang menantang dominasi patriarki, baik dalam

materi maupun proses pembelajaran Sejarah. Guru Penggerak menerapkan pendekatan partisipatif seperti pembelajaran berbasis proyek, pendekatan berdiferensiasi yang membuka ruang dialogis dan kolaboratif antara siswa laki-laki dan perempuan. Mengenai tantangan bias peran gender yang masih muncul dalam pembelajaran Sejarah, Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah mendorong keterlibatan setara dan penciptaan ruang aman bagi siswa untuk menyuarakan gagasannya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip desentralisasi otoritas pengetahuan, di mana Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah berperan sebagai fasilitator, bukan sumber tunggal kebenaran pengetahuan.

Berkaitan dengan aspek konten atau materi sejarah, Guru Penggerak mendekonstruksi narasi sejarah patriarkis secara kontekstual dengan menghubungkan antara masa lalu dan masa kini. Pendekatan ini sejalan dengan semangat feminisme posmodern yang menolak narasi besar feminisme Barat dan menekankan bahwa pengalaman perempuan di tradisional dapat diangkat dalam pembelajaran Sejarah. Pengalaman historis Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang menjadi bentuk nyata dari implementasi pedagogi feminis yang membebaskan, kritis, inklusif, dan transformatif. Guru Penggerak tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran gender siswa melalui pembelajaran Sejarah yang berkeadilan dan berperspektif gender. Implementasi pedagogi feminis yang dilakukan oleh Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah merefleksikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai instrumen kebijakan pembangunan berbasis gender terutama dalam ranah pendidikan. Upaya ini perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat integrasi perspektif gender dalam proses pembelajaran Sejarah dan profesionalisme guru.

Ketiga, Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam implementasi pedagogi feminis, yang meliputi dimensi kultural, struktural, dan pedagogis. Tantangan kultural muncul dari resistensi terhadap feminisme yang masih dianggap sebagai ideologi asing (Barat) yang bertentangan dengan konsep asli Indonesia (*indigenous concept*). Secara struktural, tantangan muncul dari kurikulum Pendidikan Sejarah

dan buku teks Sejarah yang masih dominan maskulin dan belum mengakomodasi secara eksplisit pendekatan pengarusutamaan gender. Meskipun Kurikulum Merdeka memberikan ruang untuk pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi, namun representasi perempuan dalam materi sejarah dan sumber ajar masih sangat terbatas. Adapun keterbatasan media pembelajaran dan bahan ajar sejarah yang berkeadilan gender juga menjadi hambatan serius. Ketergantungan pada internet tanpa kurasi sistematis berisiko memperkuat bias yang sudah ada.

6.2. Implikasi

6.2.1. Implikasi Teoritis

Pertama, pengalaman historis Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang memperlihatkan bahwa pedagogi feminis harus dikontekstualisasikan sesuai dengan realitas sosial, budaya, dan politik setempat. Hal ini menegaskan bahwa pedagogi feminis bukan sekadar metode, tetapi sebuah kerangka etis, pendekatan dan bersifat politis yang mendorong terciptanya ruang belajar yang setara, partisipatif, dan reflektif. Pedagogi feminis perlu bergerak melampaui kritik atas relasi kuasa patriarkis dan menjangkau praktik-praktik lokal yang mampu memberdayakan guru dan siswa, terutama dalam menghadapi struktur kurikulum yang belum sensitif gender.

Kedua, implementasi pembelajaran Sejarah yang dilakukan oleh Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang menunjukkan penerapan prinsip feminisme posmodern yang menolak narasi tunggal dan universal dari feminisme Barat. Guru Penggerak mempraktikkan dekonstruksi terhadap narasi sejarah maskulin dan menggantinya dengan representasi sejarah yang lebih inklusif dan beragam. Pendekatan ini menegaskan pentingnya *local agency* dalam membangun epistemologi feminis di ruang kelas di mana peran tradisional memiliki nilai transformasional dalam Pendidikan Sejarah.

Ketiga, implikasi dari praktik Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang menunjukkan bahwa emansipasi tidak hanya berarti keterlibatan perempuan peran profesional tetapi juga pengakuan terhadap makna dan nilai dari peran tradisional. Pedagogi feminis yang berpadu dengan feminisme

posmodern menawarkan pendekatan yang tidak dikotomis, tetapi justru menjembatani ketegangan antara tradisi dan modernitas, antara domestik dan publik, serta antara universalitas dan partikularitas dalam perjuangan gender.

Keempat, pengalaman Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang memperkuat asumsi bahwa kurikulum Pendidikan Sejarah tidak netral, melainkan hasil dari konstruksi ideologis yang mencerminkan relasi kuasa dalam masyarakat. Marjinalitas narasi perempuan dalam buku teks Sejarah memperlihatkan bahwa pengetahuan yang diajarkan di sekolah mereproduksi ketimpangan gender secara struktural. Pedagogi feminis dan feminisme posmodern mendorong desentralisasi epistemologi yakni pembongkaran otoritas tunggal atas kebenaran dan pembukaan ruang bagi keberagaman pengalaman perempuan.

6.2.2. Implikasi Praktis

Pertama, perlunya program pelatihan dan pengembangan profesional guru Sejarah yang secara khusus membekali dengan pemahaman tentang pedagogi feminis serta keterampilan untuk mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran Sejarah. Pelatihan ini sebaiknya berbasis praktik dan reflektif, agar guru Sejarah dapat mengaitkan konsep feminisme dengan konteks budaya dan sosial lokal yang dihadapi di kelas. *Kedua*, dokumen kurikulum Pendidikan Sejarah dalam Kurikulum Merdeka secara eksplisit mencantumkan feminisme sebagai salah satu pendekatan. Meskipun langkah ini dapat dianggap progresif, penerapannya masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut antara lain disebabkan oleh integrasi materi sejarah ke dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), yang berimplikasi pada semakin sempitnya ruang bagi narasi sejarah perempuan. Selain itu, pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan buku teks, khususnya terkait jumlah halaman, turut membatasi eksplorasi sejarah perempuan secara mendalam. Maka dari itu diperlukan buku teks Sejarah yang lebih inklusif, berkeadilan gender, dan mampu merepresentasikan kontribusi perempuan dalam sejarah secara beragam dan komprehensif. Namun demikian, upaya ini tetap menghadapi batasan mengingat tidak semua peristiwa sejarah dapat dimuat dalam buku teks. Untuk itu,

penyusunan buku pengayaan sejarah perempuan menjadi solusi strategis untuk melengkapi kekosongan representasi sekaligus membuka ruang bagi pembelajaran Sejarah yang lebih kritis dan transformatif.

Ketiga, mendorong penyediaan dan pengembangan media dan sumber pembelajaran digital yang merepresentasikan sejarah perempuan. Media digital memiliki potensi besar dalam menghadirkan narasi alternatif yang selama ini terpinggirkan dalam historiografi arus utama. Melalui pemanfaatan teknologi digital, sejarah perempuan dapat disajikan melalui berbagai format yang menarik dan interaktif seperti video dokumenter, *podcast*, peta sejarah digital, museum virtual, atau platform pembelajaran daring yang mampu menjangkau siswa secara lebih luas dan kontekstual. Upaya ini juga menjadi strategi untuk mendekolonisasi pengetahuan sejarah, sekaligus menanggapi keterbatasan representasi dalam buku teks Sejarah konvensional.

Keempat, melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan diperkuat agar secara eksplisit mengintegrasikan pendekatan pengarusutamaan gender (PUG) dalam tujuan, konten, dan indikator capaian pembelajaran (CP). Penyusunan dokumen kebijakan pendidikan juga harus melibatkan perspektif feminis, sehingga kebijakan tidak hanya mengedepankan kesetaraan formal, tetapi juga keadilan substantif dalam ruang belajar. *Keempat*, komunitas Guru Penggerak dapat berperan sebagai ruang advokasi dan refleksi kolektif atas praktik pendidikan yang lebih inklusif dan adil gender dalam pembelajaran Sejarah. Forum ini dapat digunakan untuk berbagi praktik baik berupa strategi, tantangan, dan keberhasilan dalam menerapkan pedagogi feminis serta mendorong gerakan akar rumput yang dapat memengaruhi kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Upaya ini melibatkan perkumpulan guru Sejarah meliputi MGMP, AGSI dan komunitas terkait. *Kelima*, penelitian ini memiliki keterbatasan ditinjau dari aspek fokus dan lingkup penelitian. Penelitian ini hanya fokus pada guru Sejarah yang telah mengikuti Program Guru Penggerak (PGP) sehingga memiliki karakteristik yang cenderung homogen. Penelitian ini juga terbatas dalam mengeksplorasi pengalaman siswa terhadap praktik pembelajaran Sejarah yang diorientasikan pada keadilan gender dan pendekatan pedagogi feminis.

6.3. Rekomendasi

6.3.1. Guru Sejarah dan Praktisi Pendidikan

Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah yang menjadi subjek penelitian ini harus bangga dan percaya diri dalam menerapkan pendekatan pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah. Upaya ini menempatkan guru sebagai penulis sejarah perempuan berdasarkan pengalamannya (*writing woman*). Pengalaman Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun kolaborasi dengan LPTK, MGMP, AGSI, dan pemangku kepentingan lain dalam penerapan pedagogi feminis pada pembelajaran Sejarah. Pengalaman Guru Penggerak mata pelajaran Sejarah di SMA Kota Palembang ini juga sebagai penguatan bahwa peran tradisional merupakan bagian dari perjuangan feminisme.

6.3.2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai perumus kebijakan pendidikan perlu membangun kembali pendekatan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kurikulum nasional untuk mewujudkan pedagogi feminis secara konkret. Kemendikdasmen perlu menginisiasi pelatihan bagi guru Sejarah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai upaya memperkenalkan dan melatih pendekatan pembelajaran berbasis gender, yang merupakan implikasi dari kebijakan pengarusutamaan gender (PUG). Pelatihan ini idealnya juga melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Komnas Perempuan untuk memperkuat perspektif kesetaraan gender dan memastikan relevansi kebijakan dengan praktik pendidikan.

6.3.3. Dinas Pendidikan Daerah

Mendukung pelatihan dan pendampingan guru Sejarah dalam menerapkan pendekatan pembelajaran Sejarah yang responsif gender. Selain itu, dinas juga perlu memfasilitasi forum praktik baik antar Guru Penggerak serta melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum guna mencegah penguatan bias gender dalam pendidikan.

6.3.4. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

LPTK dapat melakukan evaluasi atau merevisi kurikulum Pendidikan Sejarah, agar mencakup materi tentang pedagogi feminis, sejarah perempuan, dan mengembangkan *cyber feminism*. Selain itu, LPTK perlu menyediakan pengalaman praktik mengajar di lingkungan yang mendukung nilai-nilai kesetaraan gender. Sebagai langkah institusional, pengajaran sejarah menjadi mata kuliah tersendiri, pembangunan pusat studi gender di lingkungan LPTK dapat menjadi ruang kajian interdisipliner dan advokasi yang berkelanjutan, sekaligus menjadi pusat pengembangan sumber daya, pelatihan, serta produksi pengetahuan terkait pendidikan yang adil gender dan inklusif.

6.3.5. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini menempatkan peran tradisional setara dengan peran profesional, di mana melalui implementasi pedagogi feminis oleh Guru Penggerak, terbentuk apa yang disebut *writing woman*. Konsep ini penting untuk didukung, terutama di tengah representasi perempuan yang cenderung maskulin (*written woman*). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pedagogi feminis yang menempatkan peran tradisional perempuan sebagai bagian dari perjuangan feminisme. Pengembangan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *cyber feminism*; pengembangan asesmen dan evaluasi berperspektif feminis; riset studi komparatif mengenai praktik pedagogi feminis dalam pembelajaran Sejarah di berbagai wilayah, baik di tingkat nasional maupun internasional termasuk di sekolah-sekolah yang berbasis budaya lokal. Riset terhadap integrasi materi sejarah perempuan, yang tentunya berkaitan erat dengan kurikulum Pendidikan Sejarah, baik di jenjang sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi, serta pengembangan materi sejarah oleh para guru dan dosen.